

DOKUMEN RANCANGAN AKHIR



RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta -Puncak Indah- Malili



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Malili, Oktober 2023



KEPALA DINAS,

Drs. SUKARTI

Pangkat. Pembina Utama Muda
NIP. 19650210193031015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB. I : PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 6

1.3. Maksud dan Tujuan 8

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB. II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD..... 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 23

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 31

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 50

BAB. III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 52

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 53

3.3. Program dan Kegiatan 55

BAB. IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 91

BAB. V : PENUTUP 109

Daftar Tabel

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021 12

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur 27

Tabel 3. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 32

Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 51

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Renja Dinsos P3A Tahun 2024 55

Tabel 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial P3a Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 57

Tabel 7. Alokasi anggaran Dinas Sosial P3a Kabupaten Luwu timur Tahun 2024 91

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur merupakan suatu lembaga yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfungsi untuk :

- a. Perumusan kebijakan Dinas;
- b. Penyusunan Rencana Strategik Dinas;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Dinas

Implementasi kebijakan dan program kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain : (1) Banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial) masih rendah; (2) Banyaknya fakir miskin, sementara bantuan ekonomi produktif terbatas; serta (3) Masih banyaknya tindak kekerasan (eksploitasi dan diskriminasi) terhadap perempuan dan anak

Berdasarkan permasalahan diatas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada RPJMD dan RKPD Kabupaten Luwu Timur serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 - 2026.

Sebagaimana Visi Bupati Luwu Timur, yaitu : **“Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”**,. Visi tersebut merupakan cita-cita untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Timur yang mempunyai pemerintah dan masyarakat yang tangguh, unggul, menerapkan nilai-nilai budaya , dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, sarana prasarana yang baik, berkualitas dan berteknologi tinggi, masyarakatnya makmur, tersedianya lapangan pekerjaan, terhapusnya kemiskinan dan profesionalisme aparatur. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

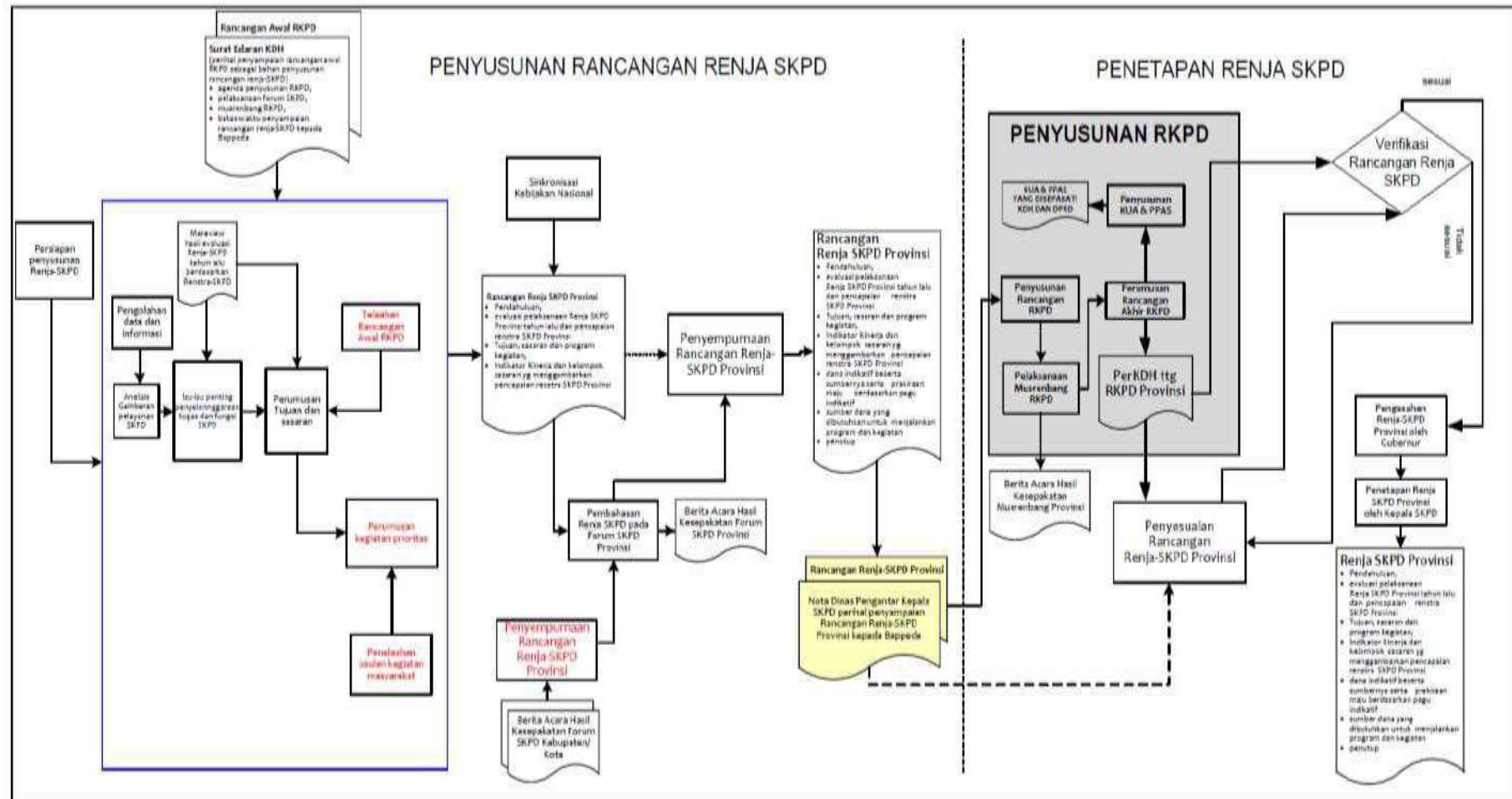
Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan misi yang ke-1 yaitu Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh

. Misi ini diarahkan untuk **mencapai kesejahteraan sosial** meningkatnya taraf hidup masyarakat, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan.

Renja Dinsos P3A Tahun 2024 merupakan rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat berdasarkan rancangan prioritas yang akan dicapai. Renja tersebut selanjutnya akan dituangkan kedalam beberapa program dan kegiatan yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024



Penyusunan Renja dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan, serta memperhatikan keselarasan program pemerintah pusat melalui kementerian terkait dengan menghimpun usulan dari kabupaten/kota di dalam proses perencanaan pencapaian Kesejahteraan Sosial. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, telah dilalui tahapan dan mekanisme perencanaan tingkat daerah seperti Rapat Koordinasi Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Forum Perangkat Daerah, dan tahapan Musrenbang guna merumuskan perencanaan tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 10 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu timur Nomor 103

10. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pembangunan di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang selanjutnya dituangkan dalam RKA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Luwu Timur adalah :

- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan dokumen perencanaan;
- Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinsos P3A Tahun 2024;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, disusun seperti berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, dan realisasi renstra perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB. II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan Renstra yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun sesuai dengan besaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) tahun 2022 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD Dinsos P3A. Pada Tahun 2022 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) melaksanakan 11 program dan 21 kegiatan serta 39 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.626.056.692 atau 98,68 % dari total anggaran sebesar Rp. 11.781.940.200 yang terdiri atas realisasi belanja Operasi sebesar Rp. 10.924.914.042 atau sebesar 98,74% dari pagu anggaran sebesar 11.064.011.224 dan belanja Modal sebesar Rp. 701.142.450 atau sebesar 97,66 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 717.928.976,-. Untuk lebih jelasnya kinerja Dinsos P3A pada tahun 2022 dapat disajikan pada table 01 **(Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)** sebagai berikut :

Tabel 01 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021
KABUPATEN LUWU TIMUR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD) Tahun n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2022		SKPD pelaksana
					Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target s/d Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100	96,80	100	94.25	94,25	100	100	100	Dinsos P3A
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	2	2	100.00	3	100	100	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	2	2	100.00	3	2	100.00	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	2	2	100.00	3	2	100	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	10	10	10	10	100.00	10	10	100	
	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase rata-rata cpaian kinerja adminsitasi keuangan peranglat daerah	100	98	100	97,6	97,6	100	99	99	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (orang)	20	21	21	21	100.00	21	20	100	
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Smesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	16	16	16	16	100	16	16	100	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100.00	100	100	100	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	10	10	10	10	100.00	10	10	100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	98,7	100	92	92	100	100	100	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan (jenis)	7	7	7	7	100.00	7	7	100.00	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	1	1	1	1	100.00	1	1	100	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)	5	5	5	5	100	5	5	100	
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan (Eksamplar)	60	60	60	60	100	60	60	100.00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kebutuhan makan dan minum tamu dan pegawai (orang)	110	110	110	110	100	110	110	100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan (kali)	415	405	400	411	100	415	415	100	
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	0	0	0	0	0	0	10	98	
	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan (jenis)	0	0	0	0	0	0	1	100	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan (jenis)	0	0	0	0	0	0	1	100	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat keluar dan surat masuk yang diadministrasikan (nomor)	1250	1200	1200	1333	111	1250	1250	100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	48	36	36	36	100.00	48	48	100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	3	11	3	3	100.00	3	100	100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100	100	100	100	100.00	100	100	100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	11	11	11	11	100.00	11	11	100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (jenis)	42	37	37	37	100.00	37	42	100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	1	1	1	1	100	1	1	100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang diberikan Bantuan Sosial	43,93	0,78	0,80	0,84	0.84	39,74	43,78	100	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Prosentase Panti social yang menerima program	20	15	13.5	13.5	100	13,5	17,5	100	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Kabupaten/Kota	pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya									
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	40	24	24	24	100	27	57	100	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM) (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi (orang)	100	100	100	100	100	100	100	144.49	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	70	50	50	50	100.00	50	70	100	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan (kali)	2	2	2	1	50	1	2	100	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial (orang)	100	70	90	90	100.00	95	95	100.00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM	90	70	90	90	100.00	95	100	100	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang miskin yang divalidasi (jiwa)	26123	26023	26073	26073	100.00	26023	100	100	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan sosial PKH (KK)	9000	7500	7500	7238	96.50	9000	9017	100	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhannya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kotat (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat	100	100	100	100	100.00	100	100	100	
	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang diberikan bantuan makanan (jiwa)	250	150	150	151	100	150	254	100	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100	100	100	100	100.00	100	100	100	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3	3	3	3	100.00	3	100	100	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3	3	3	3	100.00	3	100	100	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga PEMERINTAH	74,69	76	75	76,8	100.00	76.02	76,02	100	
		Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23,29	24	25	23,20	92,8	23.98	23,98	100	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah prasyarat prasarat PUG yang terpenuhi	7	6	7	7	100	7	7	100	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang memenuhi 7 prasyarat PUG (OPD)	41	39	39	39	100.00	39	41	100	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keterwakilan perempuan di DPRD	3	2	2	2	100.00	3	3	100	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi (orang)	180	64	64	64	100.00	64	95	83	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi (kelompok)	41	39	39	39	100.00	39	41	100	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	81,82	70	72,73	72	100	72,73	81.82	100	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah kabupaten/kota	Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpaduh	13	9	10	10	100.00	10	13	100	
	Kordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat perempuan yang mengikuti rapat kordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	60	60	60	60	100.00	60	60	100	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)	3	0	0	0	0	0	10	100	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)	3	0	0	0	0	0	10	100	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum	13	9	10	10	100.00	10	13	100	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan (orang)	40	40	40	40	100	40	40	100	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Ratio layanan pembelajaran keluarga	0,11	0.7	0,7	0,7	100	0,7	0,9	100	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberikan pengembangan dalam hal peningkatan kualitas keluarga (orang)	50	50	50	50	100	50	59	100	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas keluarga (orang)	50	50	50	50	100	50	50	100	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data gender yang diolah (dokumen)	1	1	1	1	100	1	1	100	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah profil gender dan anak yang disusun (dokumen)	1	1	1	1	100	1	1	100	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase indikator KLA yang terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1	1	1	1	100	1	1	100	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1	1	1	1	100	1	1	100	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten (lembaga)	1	1	1	1	100	1	1	100	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten (lembaga)	1	1	1	1	100	1	1	100	

Dari Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja 2020 dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s/d Tahun 2021 lampiran Tabel 1 **(Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)** dari 20 (dua puluh) kegiatan yang dilaksanakan, semua memenuhi target yang ditetapkan. Dengan rincian sebagai berikut :

Apabila dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA pada tahun 2020 terdapat 11 program dan 20 Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran pada tahun 2020 terealisasi pada masing-masing kegiatan sebanyak 100 % seperti terlihat pada tabel 1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) diatas.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi terhadap Kesejahteraan sosial.

Dalam hal penyelenggaraan tugas pokok, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, melaksanakan penyusunan dan kebijakan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Luwu Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Berdasarkan hasil evaluasi laporan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur terlihat masih banyak permasalahan yang perlu diidentifikasi, yaitu:

Bidang Sosial

Di Kabupaten Luwu Timur, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan program-program yang difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Meskipun demikian, penanganan permasalahan sosial menjadi tanggung jawab tiga pilar pembangunan yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia swasta.

Sesuai dengan misi pertama Bupati Luwu Timur untuk **Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.**

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan; maka Dinas Sosial P3A sebagai Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial memiliki Misi keterkaitan yaitu :

1. Mewujudkan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui bantuan, bimbingan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, lembaga sosial, kelompok rentan, dan korban bencana serta upaya memperkecil kesenjangan sosial;
2. Meningkatkan usia hidup, harkat martabat serta kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Salah satu faktor yang mempengaruhi angka kriminalitas yaitu rasio kekerasan di dalam rumah tangga. Karena adanya kekerasan pada perempuan dan anak serta kekerasan dalam rumah tangga termasuk di dalam tindak kriminal. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengampu urusan pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan dan menangani permasalahan Perempuan dan Anak untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan, maka perlu :

- a. Peningkatan Jumlah kelompok organisasi perempuan yang dilatih tentang pengarusutamaan gender (penyusunan data terpilah untuk profil gender);
- b. Peningkatan Jumlah kelompok organisasi perempuan yang memahami data terpilah untuk penyusunan profil gender;
- c. Peningkatan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu;
- d. Peningkatan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di Rumah Sakit;
- e. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
- f. Peningkatan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;

- g. Peningkatan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2021-2026. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :

**TABEL 02 (Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KAB. LUWU TIMUR**

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial	38,62	43,28	43,43	43,65	43,79	54,21	69,26	55,36	60,00	
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50,76	50,77	50,78	50,79	50,81	50,76	54,09	54,09	55,00	
3	Prosentase kekerasan terhadap perempuan	0,04	0,036	0,020	0,014	0,013	0,04	0,03	0,03	0,02	
4	Prosentase kekerasan terhadap Anak	0,022	0,020	0,017	0,016	0,015	0,01	0,02	0,02	0,01	
5	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Jika dilihat Tabel 2 (**Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017**) di atas, hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur menunjukkan keberhasilan pencapaian yang dapat dilihat bahwa realisasi dari tahun ke tahun terus meningkat, peningkatan capaian indikator kinerja ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui program-program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial dengan cara mengukur berapa persen jumlah PMKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial di Kabupaten Luwu Timur. Pada tahun 2022 target Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial adalah 43,28 %. Realisasi capaian di tahun 2022 adalah sebesar 69,26. Hal ini berarti penanganan permasalahan sosial di Kabupaten Luwu Timur telah melebihi target. Angka tersebut diperoleh dari $((\text{Jumlah PMKS yang ditangani} / \text{Jumlah PMKS yang ada}) \times 100\%)$. Hal itu didukung oleh program Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang diperoleh berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Luwu Timur masih berada pada posisi 54,09 poin.

Indikator : Prosentase kekerasan terhadap Perempuan diperoleh melalui $(\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani secara komprehensif} / \text{Jumlah Rumah Tangga}) \times 100\%$ sedangkan Prosentase kekerasan terhadap anak diperoleh $(\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani secara komprehensif} / \text{Jumlah Rumah Tangga}) \times 100\%$

terhadap anak yang ditangani secara komperhensif/Jumlah Anak) dikali 100 %. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sebanyak 22 kasus /dibagi Jumlah rumah tangga sebanyak 70.198 rumah sehingga memperoleh perhitungan sebesar 0,031 persen. Kasus kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi. Penyebab utama yang dominan adalah factor ekonomi dan perselingkuhan. Sedangkan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sebanyak 18 kasus dengan jumlah anak sebanyak 116.961 sehingga diperoleh hasil perhitungan 0,02 persen. Kasus kekerasan terhadap anak juga cukup tinggi dengan penyebab yang hamper sama dengan kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu factor ekonomi.

Indikator : Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani diperoleh melalui $(\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang ditangani} / \text{Jumlah korban bencana alam sosial seluruhnya} \times 100\%)$. Jumlah korban bencana alam yang ditangani sebanyak 299 jiwa dibagi Jumlah korban seluruhnya sebanyak 299 jiwa sehingga memperoleh perhitungan sebesar 100 persen.

indikator ***Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah*** diperoleh dari hasil $(\text{Jumlah total capaian program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten} \times \text{jumlah kegiatan yang mendukung program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten})$ Jumlah total capaian program penunjang 14,29 dikali jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan sehingga diperoleh capaian 100 %

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 2021-2026, adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Adanya kebutuhan atas penanganan masyarakat miskin dan penyandang kesejahteraan masalah social masih tergantung dari bantuan. Dalam menangani urusan social terutama pada penyandang masalah kesejahteraan sosial terkadang tidak sesuai dengan perencanaan atas kebutuhan pemberian bantuan dan pemberdayaan, hal ini juga dipengaruhi oleh harapan hidup seseorang dan kematian.

Namun permasalahan itu dapat diatasi dengan adanya kerjasama dan koordinasi dari berbagai sector. Adanya pendataan berbasis system informasi teknologi yang lebih akurat dan mempercepat proses pemberian bantuan, pemberdayaan PMKS, serta banyaknya rekan kerja hingga ke wilayah terkecil pedesaan dengan dibantu para kader.

b. Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak

Anak adalah calon pemimpin bangsa sedangkan perempuan adalah guru pertama bagi calon generasi bangsa. Namun kekerasan pada perempuan dan anak masih banyak terjadi, hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman uokum dalam kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat . Oleh karenanya Dinas Sosial P3a Kabupaten Luwu Timur melaksanakan sosialisasi, dan pendampingan bagi korban kekerasan serta pendampingan lingkungan korban kekerasan karena kekerasan terjadi bukan hanya disebabkan dari factor pelaku, namun kondisi dari lingkungan pelaku maupun korban. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menciptakan dan mewujudkan Luwu Timur Kabupaten Layak Anak serta mengupayakan pembentukan UPTD Penanganan Korban Kekerasan.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan renja dengan kebutuhan tahun 2024. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD dan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 disajikan pada tableberikut: :

TABEL 03 (Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	-2	3	4	5	-6	7	8	-9	-10	-11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase rata-rata capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	100%	3.711.790.771	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase rata-rata capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	100%	3.711.790.771	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat yang disusun tepat waktu	100%	143.106.500	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat yang disusun tepat waktu	100%	143.106.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	60.871.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	60.871.000	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	7.564.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	7.564.000	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	4.712.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	4.712.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 dokumen	69.959.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 dokumen	69.959.500	
	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	SKPD	Prosentase rata-rata cpaian kinerja adminsitasi keuangan peranglat daerah	100%	2.511.139.461	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	SKPD	Prosentase rata-rata cpaian kinerja adminsitasi keuangan peranglat daerah	100%	2.511.139.461	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	19 org	2.429.659.461	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	19 org	2.429.659.461	
	Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	16 dokumen	81.480.000	Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	16 dokumen	81.480.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SKPD	Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	59.530.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	59.530.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya	SKPD	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya	SKPD	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	0	0	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	10 orang	59.530.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	10 orang	59.530.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SKPD	Prosentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	473.213.810	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SKPD	Prosentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	473.213.810	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan	7 jenis	3.307.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan	7 jenis	3.307.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	0	0	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	0	0	
	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 jenis	33,099.010	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 jenis	33,099.010	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	5 jenis	14.210.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	5 jenis	14.210.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	60 eksamplar	6.540.000	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	60 eksamplar	6.540.000	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SKPD	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	110 ORANG	7.250.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SKPD	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	110 ORANG	7.250.000	
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	410 kali	408.807.800	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	410 kali	408.807.800	
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SKPD	Prosentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100%	207.700.000	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SKPD	Prosentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100%	207.700.000	
	Pengadaan Kendaraan dinas operasional/lapangan	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	0	0	Pengadaan Kendaraan dinas operasional/lapangan	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	0	0	
	Pengadaan mebel	SKPD	Jumlah mebel yang diadakan	0	0	Pengadaan mebel	SKPD	Jumlah mebel yang diadakan	0	0	
	Pengadan Peralatan dan mesin lainnya	SKPD-	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	0	0	Pengadan Peralatan dan mesin lainnya	MALILI	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	0	0	
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	207.700.000	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	207.700.000	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	SKPD	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	0	0	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	SKPD	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	0	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Prosentase rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100%	109.310.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Prosentase rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100%	109.310.000	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

			Urusan Pemerintahan Daerah					Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	SKPD	Jumlah surat keluar dan surat masuk yang digendakan	1200 nomor	2.750.000	Penyediaan Jasa Surat menyurat		Jumlah surat keluar dan surat masuk yang digendakan	1200 nomor	2.750.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	48 rekening	58.560.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	48 rekening	58.560.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	SKPD	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	3 orang	48.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	3 orang	48.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	SKPD	Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	207.791.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	SKPD	Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	207.791.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	11 unit	128.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	11 unit	128.400.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	SKPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (jenis)	41 unit	30.390.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kabupaten	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (jenis)	41 unit	30.390.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	SKPD	Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	2 unit	49.001.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	2 unit	49.001.000	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kabup aten Luwu Timur	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	43,78%	3.431.037.009	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kabup aten Luwu Timur	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	43,78%	3.431.037.009	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kabup aten Luwu Timur	Prosentase Panti social yang menerima program pemberdayaa n social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya	20%	3.431.037.009	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kabup aten Luwu Timur	Prosentase Panti social yang menerima program pemberdayaa n social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya	20%	3.431.037.009	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupa ten Luwu Timur	Jumlah sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	40 kelompok	3.431.037.009	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupa ten Luwu Timur	Jumlah sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	40 kelompok	3.431.037.009	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kabupa ten Luwu Timur	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Ana	100%	1.070.973.525	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kabupa ten Luwu Timur	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Ana	100%	1.070.973.525	

			k Terlantar, Lanj ut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)('%)					k Terlantar, Lanj ut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)('%)			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kabupa ten Luwu Timur	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi (persen)	100	1.070.973.525	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kabupa ten Luwu Timur	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi (persen)	100	1.070.973.525	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial (orang)	100 orang	175.395.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, pengemis gelandangan, penyandang penyakit sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum yang diberikan bimbingan sosial (orang)	100 orang	175.395.000	
	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	60 orang	841.928.525	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	60 orang	841.928.525	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan (kali)	2 kali	53.650.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan (kali)	2 kali	53.650.000	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kabupa ten Luwu Timur	Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial ('%')	100%	407.536.200	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kabupa ten Luwu Timur	Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial ('%')	100%	407.536.200	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupa ten Luwu Timur	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM	1 dokumen	407.536.200	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupa ten Luwu Timur	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM	1 dokumen	407.536.200	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupa ten Luwu Timur	Jumlah fakir miskin yang didata (KK)	26.123	157.538.100	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupa ten Luwu Timur	Jumlah fakir miskin yang didata (KK)	26.123	157.538.100	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kabupa ten Luwu Timur	jumlah keluarga miskin yang difasilitasi bantuan sosial PKH (KK)	9000	249.998.100	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kabupa ten Luwu Timur	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi bantuan sosial PKH (KK)	9000	249.998.100	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kabupa ten Luwu Timur	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi	100	205.528.900	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kabupa ten Luwu Timur	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi	100	205.528.900	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

			Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota ('%)					Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota ('%)			
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat	100 %	205.528.900	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat	100 %	205.528.900	
	Penyediaan Makanan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	275 jiwa	205.528.900	Penyediaan Makanan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	275 jiwa	205.528.900	
	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan	Kabupaten Luwu timur	Jumlah Tagana yang dibina	0	0	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan	Kabupaten Luwu timur	Jumlah Tagana yang dibina	0	0	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	bencana kabupaten/kota					bencana kabupaten/kota					
	Kordinasi, sosialisasi pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dibina	0	0	Kordinasi, sosialisasi pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dibina	0	0	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100%	250.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100%	250.000.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kec. Malili, Wotu, Mangkutana	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit	250.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kec. Malili, Wotu, Mangkutana	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit	250.000.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kec. Malili, Wotu, Mangkutana	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit	250.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kec. Malili, Wotu, Mangkutana	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit	250.000.000	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	75,25	307.148.921	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	75,25	307.148.921	
		Kabupaten Luwu Timur	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	24,75			Kabupaten Luwu Timur	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	24,75		

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah prasyarat prasarat PUG yang terpenuhi	7	101.077.721	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah prasyarat prasarat PUG yang terpenuhi	7	82.260.717	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah SKPD yang mengimplmentasikan prasarat PUG (OPD)	39 opd	101.077.721	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah SKPD yang mengimplmentasikan prasarat PUG (OPD)	7	101.077.721	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah kursi di DPRD yang di duduki perempuan	3	206.071.200	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah kursi di DPRD yang di duduki perempuan	39 opd	101.077.721	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi (orang)	180 orang	81.044.100	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi (orang)	3	206.071.200	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi (kelompok)	39 klpok	125.027.100	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi (kelompok)	180 orang	81.044.100	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kabupa ten Luwu Timur	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	72,73	939.681.624	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kabupa ten Luwu Timur	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	72,73	939.681.624	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupa ten Luwu Timur	Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpaduh	11 orang	325.248.876	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupa ten Luwu Timur	Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpaduh	11 orang	325.248.876	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupa ten Luwu Timur	Jumlah masyarakat/perempuan yang mengikuti rapat kordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (orang)	60 orang	325.248.876	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupa ten Luwu Timur	Jumlah masyarakat/perempuan yang mengikuti rapat korrdinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (orang)	60 orang	325.248.876	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum	11 orang	614.432.748	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum	11 orang	614.432.748	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan (orang)	40 orang	614.432.748	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan (orang)	40 orang	614.432.748	
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)	0	0	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)	0	0	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)	0	0	Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)	0	0	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kabupa ten Luwu Timur	Ratio layanan pembelajaran keluarga	0,14	60.486.100	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kabupa ten Luwu Timur	Ratio layanan pembelajaran keluarga	0,14	60.486.100	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupa ten Luwu Timur	Jumlah masyarakat yang diberiakan konseling kualitas keluarga (orang)	50 orang	60.486.100	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupa ten Luwu Timur	Jumlah masyarakat yang diberiakan konseling kualitas keluarga (orang)	50 orang	60.486.100	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupa ten Luwu Timur	Jumlah masyarakat yang diberiakan konseling kualitas keluarga (orang)	50 orang	60.486.100	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupa ten Luwu Timur	Jumlah masyarakat yang diberiakan konseling kualitas keluarga (orang)	50 orang	60.486.100	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kabupa ten Luwu Timur	Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota	100 %	40.775.100	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kabupa ten Luwu Timur	Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota	100 %	40.775.100	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupa ten Luwu Timur	Jumlah data gender yang diolah (dokumen)	1 dokumen	40.775.100	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupa ten Luwu Timur	Jumlah data gender yang diolah (dokumen)	1 dokumen	40.775.100	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Penyediaan data gender dan anak kewenangan kabupaten kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah data gender yang diolah (dokumen)	1 dokumen	40.775.100	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah data gender yang diolah (dokumen)	1 dokumen	40.775.100	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase indikator KLA yang terpenuhi	100%	325.827.050	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase indikator KLA yang terpenuhi	100%	325.827.050	
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1	154.388.700	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1	154.388.700	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1 kali	154.388.700	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1 kali	154.388.700	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten (lembaga)	1	171.438.350	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten (lembaga)	1	171.438.350	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten (lembaga)	1 lembaga	171.438.350	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten (lembaga)	1 lembaga	171.438.350	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSU ANAK	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase anak korban kekerasan termasuk TPPO	0	0	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSU ANAK	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase anak korban kekerasan termasuk TPPO	0	0	
	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota	Kabupaten Luwu timur	Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpaduh	0	0	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota	Kabupaten Luwu timur	Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpaduh	0	0	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum	0	0	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum	0	0	
					10.750.785.200					10.750.785.200	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Luwu Timur membuka akses yang luas kepada masyarakat dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya melalui mekanisme musrenbang. Tahapan Penyusunan Renja perangkat daerah Tahun 2024 mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Sistem perencanaan tersebut dilaksanakan secara berjenjang dari level terbawah sampai tingkat kabupaten. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Kecamatan yang sudah dilaksanakan pada awal tahun 2023, tidak terdapat usulan kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur. Namun ada beberapa usulan yang masuk berupa pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur yaitu Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Bersama (Kube) Keluarga Miskin di Wilayah Kecamatan se Kabupaten Luwu Timur .

Hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam bentuk seperti pada table 04 (**Tabel T-C. 32, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017**) berikut ini :

Tabel 04. (Tabel T-C.32, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi				Kinerja	Indikator	/ Volume	Besaran	Catatan
1	2	#						5	6	
I	Program Pemberdayaan sosial									
	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota									
1	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Kecamatan Towuti	10	kelompok kube	Jumlah sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	25,000,000	1 klp = Rp.	Rp 250.000.000	
		2	Kecamatan Mangkutana,	5	kelompok kube				125.000.000	
		3	Kecamatan Wasuponda	4	kelompok kube				100.000.000	
		4	Kecamatan Angkona	3	Kelompok kube				75.000000	
		5	Kecamatan Tomoni	3	Kelompok kube				75.000000	
		6	Kecamatan Tomoni Timur	2	Kelompok Kube				50.000000	
	JUMLAH	27	kelompok kube						Rp 675.000.000	

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat, Pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2024 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 dengan tema “ **Akselarasi Pertumbuhan Ekonomi, Penguatan infrastruktur Daerah dan Pemenuhan Layanan dasar** “

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, ditetapkan prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Penguatan konektivitas dan Pemerataan;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja;
4. Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup ; dan
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dengan tema “**Inovasi Pemanfaatan Potensi dan Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi**” dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 meliputi :

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing;

1. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur wilayah untuk akselerasi pembangunan;

2. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi;
3. Percepatan penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat;
4. Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan;
5. Pemantapan reformasi birokrasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berpedoman pada arah pembangunan Kab. Luwu Timur Tahun 2024 ditetapkan Tema pembangunan **“Pemantapan Kemajuan dan Kemandirian daerah dengan didukung oleh situasi kondusif bagi ketertiban umum dan penyelenggaraan demokrasi”**. Berdasarkan tema tersebut ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
2. Pengembangan masyarakat religius dan kerukunan ummat beragama;
3. Penataan ruang dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Pembangunan dan pelayanan pendidikan;
5. Pembangunan dan pelayanan kesehatan

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) sebagai salah satu organisasi perangkat daerah Kab. Luwu Timur dalam mewujudkan target pembangunan daerah pada tahun 2024 tersebut melaksanakan tujuan dan sasaran yang juga sejalan dengan target Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur mempunyai tujuan yakni ***Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan kegiatan jangka menengah tahun 2021-2026 adalah : **1). Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 2). Meningkatnya pemberdayaan perempuan; 3). Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4). Terpeliharannya ketahanan bencana alam dan social; 5). Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah**

Secara lebih seksama, keterkaitan antara misi pembangunan jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kab.Luwu Timur periode tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran dan indikator-indikator pembangunan yang digunakan dapat dilihat pada table 05..

Tabel. 05. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kab. Luwu Timur Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2024
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Prosentase fakir miskin terhadap total penduduk miskin	80,58 %
		Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial	43,65%
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50,79
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase kekerasan terhadap perempuan	0,02%
			Prosentase Kekerasan terhadap anak	0,016%
		Terpeliharannya ketahanan bencana alam dan sosial	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani	100%
2	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan pada dokumen perencanaan

dan keuangan tahun 2024 menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kodefikasi Nomenklatur menjadi alat untuk melakukan sinkronisasi tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan guna mewujudkan tujuan pembangunan Daerah.

Penyusunan tersebut dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Luwu Timur telah melakukan pemetaan (mapping) atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur renja tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 06. (Tabel T-C.33, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Luwu Timur

Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an						Tolak Ukur
					Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											11.971.775.000,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											10.253.775.000,00		
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											10.253.775.000,00		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											3.853.775.000,00		
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											165.000.000,00		
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

						Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 persen	80.871.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	80.000.000,00
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 persen	7.564.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Perse ntase penyunan doku men peren canaa n, penga nggar an & evalua si tepat waktu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	100 %	2 Doku men	100 perse n	4.712.000,00	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Jumla h Doku men DPA-SKPD dan Lapor an Hasil Koordi nasi Penyusunan Doku men DPA-SKPD	2 Doku men	5.000.000,00
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perse ntase penyunan doku men peren canaa n, penga nggar an & evalua si tepat waktu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua	100 %	10 Lapor an	100 perse n	69.959.500,00	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Jumla h Lapor an Evalua si Kinerj a Peran gkat Daera h	10 Lapor an	70.000.000,00

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

									Kel/Des a									
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.662.771.335,0 0					2.817.775.000,0 0
1	06	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Persentase penunja ng urusan perangk at daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Perse ntase admin istrasi keuan gan yang tersel engga ra denga n baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	100 %	21 Orang /bulan	100 perse n	2.581.291.335,0 0	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Jumla h Orang yang Mener ima Gaji dan Tunja ngan ASN	21 Orang /bulan	2.737.775.000,0 0
1	06	01	2.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

						Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Perse ntase administrasi keuangan yang tersel engga ra denga n baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	16 Laporan	100 persen	81.480.000,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumla h Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	80.000.000,00
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								59.530.000,00					70.000.000,00
1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

						Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Perse ntase Rara-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Peran gkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10 Orang	100 persen	59.530.000,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	70.000.000,00
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								483.112.010,00					462.500.000,00
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Perse ntase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Paket	100 persen	3.307.000,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	3.500.000,00

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

1	06	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Perse ntase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 persen	33.099.010,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00
1	06	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Perse ntase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	100 persen	14.210.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.000.000,00
1	06	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

						Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Perse ntase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Dokumen	100 persen	6.540.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	6.500.000,00
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Perse ntase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	11 Laporan	100 persen	7.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	7.500.000,00
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

					Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	415 Laporan	100 persen	418.706.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415 Laporan	400.000.000,00
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							144.600.000,00					0,00
1	06	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Perentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Unit	100 persen	144.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							109.310.000,00					128.500.000,00
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

						Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 persen	2.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 persen	58.560.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000,00

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

1	06	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 persen	48.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	51.000.000,00	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								207.791.000,00						210.000.000,00
1	06	01	2.09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

						Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Perse ntase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemer intahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	11 Unit	100 persen	128.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	130.000.000,00
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Perse ntase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemer intahan yang terpelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	47 Unit	100 persen	30.390.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	30.000.000,00

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

							denga n baik											
1	06	01	2.09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Perseentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 persen	49.001.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							3.745.077.009,00						4.000.000.000,00
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							3.745.077.009,00						4.000.000.000,00
1	06	02	2.03	00 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

					Prosentase PMKS yang diberikan bantuan sosial	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Panti sosial yang menerima program pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.14 %	400 Keluar ga	20 persen	3.745.077.009,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Keluar ga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Keluar ga	4.000.000.000,00
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							1.098.553.525,00					1.150.000.000,00
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							1.098.553.525,00					1.150.000.000,00

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanaan													
						Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	80 Orang	100 persen	841.928.525,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	975.000.000,00
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial													

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

						Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	10 Orang	100 persen	81.230.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat													

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

						Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	105 Orang	100 persen	175.395.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	105 Orang	175.000.000,00
--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	------	-----------	------------	----------------	------------------------------	--	--	-----------	----------------

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

																ota		
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							407.536.200,00						670.000.000,00
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							407.536.200,00						670.000.000,00
1	06	05	2.02	00 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

						Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	26173 Orang	100 orang	157.538.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	26173 Orang	350.000.000,00
1	06	05	2.02	00 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga													

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

						Prosent ase Jumlah warga negara korban bencana kab/kot a yang memper oleh perlindu ngan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapat kan Bantuan Sosial Kesejaht eraan Keluarga Kewenang an Kabupate n/Kota	Jumla h Data Penya ndang Disabil itas Terlan tar,An ak Terlan tar,La njut Usia Terlan tar dan Gepen g yang masuk dalam Data Terpa du FM dan OTM	Kab. Luwu Timur, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	100 %	9000 Kelu ar ga	100 orang	249.998.100,00	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Jumla h Kelu ar ga Peneri ma Manfa at (KPM) yang Mend apatk an Bantu an Sosial Keseja hteraa n Kelu ar ga Kewe nanga n Kabup aten/K ota	9000 Kelu ar ga	320.000.000,00
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA								205.528.900,00					330.000.000,00
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								205.528.900,00					330.000.000,00
1	06	06	2.01	00 01	Penyediaan Makanan													

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

						Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Luwu Timur, Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	250 Orang	100 persen 100 persen	205.528.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	330.000.000,00
--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	-------------------------	-----------	--------------------------	----------------	------------------------------	--	---	-----------	----------------

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

					Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota t		pada saat tanggap darurat										
					Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota t (%)												
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						250.000.000,00						250.000.000,00
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						250.000.000,00						250.000.000,00

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

1	06	07	2.01	00 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
						Prosent ase Taman Makam Pahlawa n yang dipeliha ra	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemelihar annya pada Taman Makam Pahlawan Kabupate n/Kota	Jumla h Tama n Maka m Pahla wan yang dipeli hara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	100 %	3 Maka m	3 unit lokasi	250.000.000,00	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Jumla h Maka m yang Terpe nuhi Pemel iharan nya pada Tama n Maka m Pahla wan Kabup aten/K ota	3 Maka m	250.000.000,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.447.963.721,0 0						1.718.000.000,0 0	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							1.447.963.721,0 0							1.718.000.000,0 0
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							253.448.921,00							453.000.000,00
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							101.077.721,00							145.000.000,00
2	08	02	2.01	00 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

					Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah prasyarat prasarat PUG yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.65 % 25.31 %	1 Dokumen	7 poin	101.077.721,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	145.000.000,00
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota							152.371.200,00				308.000.000,00
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi											

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

						Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keterwakilan perempuan di DPRD	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.65 % 25.31 %	1 Dokumen	9 orang	81.044.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	163.000.000,00
2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi												

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

						Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keterwakilan perempuan di DPRD	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.65 % 25.31 %	41 Organisasi	9 orang	71.327.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten	41 Organisasi	145.000.000,00
--	--	--	--	--	--	--	---	---------------------------------------	--	--------------------	---------------	---------	---------------	------------------------------	--	--	---------------	----------------

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

																aten/k ota		
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							921.681.500,00						850.000.000,00
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							307.248.876,00						300.000.000,00
2	08	03	2.01	00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

					Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.82 %	1 Dokumen	15 kasus	307.248.876,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000,00
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							614.432.624,00					550.000.000,00
2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota												

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

					Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.82 %	50 Orang	40 kasus	614.432.624,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Orang	550.000.000,00
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							72.684.400,00					165.000.000,00
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							72.684.400,00					165.000.000,00
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota												

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

						Ratio layanan pembelaan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas keluarga	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.11 %	1 Dokumen	50 orang	72.684.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	165.000.000,00
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								40.775.100,00					0,00
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								40.775.100,00					0,00
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota													

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

					Prosentase Keterse-diaan Data dan Informa-si Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota ("")%)	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah data gender yang diolah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 %	1 Dokumen	1 dokumen	40.775.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	0,00
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							159.373.800,00					250.000.000,00
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							54.388.800,00					50.000.000,00
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota												

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

						Prosentase indikator KLA yang terpenuhi Prosentase indikator KLA yang terpenuhi ("")%	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	1 Organisasi	1 kali	54.388.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	1 Organisasi	50.000.000,00
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	-------------------	--------------	--------	---------------	------------------------------	--	--	--------------	---------------

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

																	Dunia Usaha		
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							104.985.000,00							200.000.000,00
2	08	06	2.02	00 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

						Prosent ase indikato r KLA yang terpenu hi Prosent ase indikato r KLA yang terpenu hi (""%)	Jumlah Dokumen Hasil Penguata n Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkat an Kualitas Hidup Anak Kewenang an Kabupate n/Kota	Jumla h lemba ga penye dia layana n penin gkatan kualita s hidup anak tingka t kabup aten	Kab. Luwu Timur, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	100 % 100.00 %	1 Doku men	1 lemba ga	104.985.000,00	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Jumla h Doku men Hasil Pengu atan Jejarin g Antar Lemba ga Penye dia Layan an Penin gkatan Kualit as Hidup Anak Kewe nanga n Kabup aten/K ota	1 Doku men	200.000.000,00
TOTAL													10.984.880.200 ,00				11.971.775.000, 00

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) direncanakan melaksanakan 11 program, 20 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. **10.750.785.200,-**. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 07.

**ALOKASI ANGGARAN DINAS SOSIAL P3A KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2024**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.076.866.405
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				9.076.866.405
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah yang	100%	3.711.790.771

			terpenuhi		
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat yang disusun tepat waktu	100%	143.106.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	60.871.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	SKPD, MALILI	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	7.564.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD		Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	4.712.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 dokumen	69.959.500
	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase rata-rata capaian kinerja administrasi	100%	2.511.139.461

			keuangan peranglat daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan	19 orang	2.429.659.461
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Smesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	16 dokumen	81.480.000
	Adminsitasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Prosentase rata-rata cpaian kinerja Adminsitasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0%	0
	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	0	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	59.530.000

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya yang diadakan	0	0
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	SKPD	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	10 orang	59.530.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SKPD	Prosentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	473.213.810
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor		Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan	7 jenis	3.307.000
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	0	0

			diadakan		
	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 jenis	33.099.010
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	14.210.000
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	60 eksamplar	6.540.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SKPD	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	110 orang	7.250.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MALILI	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	410 kali	408.807.800
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100%	207.700.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Jumlah kendaraan	0	0

			dinas operasional yang diadakan		
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan/ mesin lainnya yang diadakan	0%	0
	Pengadaan mebel	SKPD	Jumlah mebel yang diadakan	1 jenis	0
	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang di adakan	0%	0
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kanto atau bangunan lainnya	SKPD	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (jenis)	1 paket	207.700.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Prosentase rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	109.310.000
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Skpd	Jumlah surat keluar dan surat masuk yang diadministrasikan (nomor)	1200 nomor	2.750.000

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	48 rekening	58.560.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	SKPD	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	3 orang/bln	48.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	SKPD	Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	207.791.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	11 unit	128.400.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	SKPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (jenis)	49 unit	30.390.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	SKPD	Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	1 unit	49.001.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab.Luwu Timur	Prosentase PMKS yang memperoleh	43,78	3.431.037.009

			Bantuan Sosial		
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur	Prosentase Panti social yang menerima program pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya	17,50%	3.431.037.009
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur	Jumlah sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	95	3.431.037.009
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab.Luwu Timur	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan	100%	1.070.973.525

			Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)(%)		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab.Luwu Timur	Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	100	1.070.973.525
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab.Luwu Timur	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	85 orang	175.395.000

	Penyediaan Permakanan	Kab.Lu wu Timur	Jumlah Penyandan g Disabilitas Terlantar,an ak Terlantar,La njut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakana n Sesuai Standar Gizi	50 orang	841.928.525
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab.Lu wu Timur	Jumlah bimbingan fisik, mental dan sporotual yang dilaksana n	1 kali	53.650.000
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kab.L uwu Timur	Prosentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani (%)	0	0
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab.L uwu Timur	Jumlah warga migran tindak kekerasan yang ditangani (orang)	0	0
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Lu wu Timur	Jumlah warga migran tindak kekerasan	0	0

	untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		yang ditangani (orang)		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab.Luwu Timur	Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)	100%	407.536.200
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM	60 orang	407.536.200
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur	Jumlah fakir miskin yang didata (KK)	26073	157.538.100
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab.Luwu Timur	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi bantuan sosial PKH (KK)	9000 KK	249.998.100

	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab.L uwu Timur	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten /Kota (%)	100%	205.528.900
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab.L uwu Timur	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat	100%	205.528.900
	Penyediaan Makanan	Kab.Lu wu Timur	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	200 orang	205.528.900
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.L uwu Timur	Jumlah tagana yang dibina (orang)	0	0

	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab.Luwu Timur	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dibina (orang)	0	0
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kab.Luwu Timur	Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100%	250.000.000
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit lokasi	250.000.000
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit lokasi	250.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.673.918.795
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.673.918.795
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Prosentase partisipasi perempuan di lembaga PEMERINTAH	75,25%	307.148.921
			Prosentase partisipasi perempuan di	24,75%	

			lembaga swasta		
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten	Jumlah prasyarat prasarat PUG yang terpenuhi	7 syarat	101.077.721
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten, SKPD	Jumlah SKPD yang mengimpl mentasikan prasarat PUG (OPD)	39 OPD	101.077.721
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten, SKPD	Jumlah perencana /calon fasilitator/a auditor yang terlatih teknik PPRG	0	0
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kursi di DPRD yang di duduki perempuan	2 orang	206.071.200
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi (orang)	114 orang	81.044.100
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik,	39	125.027.100

			sosial dan ekonomi (kelompok)		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	72.73 %	939.681.624
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	11 kasus	325.248.876
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat /perempuan yang mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (orang)	60 orang	325.248.876

	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum	11 orang	614.432.748
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan (orang)	50	614.432.748
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)	10 jenis	0
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)	10 jenis	0
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Ratio layanan pembelajaran keluarga (%)	0,9	60.486.100
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat yang diberikan pengembangan dalam hal	50 orang	60.486.100

			peningkat an kualitas keluarga (orang)		
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat yang diberikan pengembangan dalam hal peningkatan kualitas keluarga (orang)	50 orang	60.486.100
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota (%)	100	40.775.100
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data gender yang diolah (dokumen)	1 dokumen	40.775.100
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah profil gender dan anak yang disusun (dokumen)	1 dokumen	40.775.100
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Prosentase indikator KLA yang terpenuhi	100%	325.827.050
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1 kali	154.388.700

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1 kali	154.388.700
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten (lembaga)	1 lembaga	171.438.350
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten (lembaga)	1 lembaga	171.438.350
	TOTAL				10.750.785.200

BAB V. PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2024 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan OPD.

Pada tahun 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 11 program, 20 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

Renja Tahun 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun Anggaran 2024. Kesiapan sumber

daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2021-2026 (target di tahun 2024-nya).

Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur 2024 ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024, Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk mewujudkan good governance di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur.

Makassar, Oktober 2023



KEPALA DINAS,
DR. SUKARTI

Pangkat. Pembina Utama Muda
NIP. 19650210193031015